

**ANALISIS JEJARING KEBIJAKAN DALAM PROGRAM SERTIFIKASI
PERMUKIMAN DI ATAS AIR DI KELURAHAN KAWAL KECAMATAN
GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN**

**Oleh :
Ayunatasya
NIM. 2005020028**

ABSTRAK

Program sertifikasi permukiman di atas air dilakukan sebagai bentuk untuk menjamin perlindungan hukum bagi permukiman masyarakat di atas air. Selama ini masyarakat sulit untuk mendapatkan sertifikat karena mereka berada di atas laut, bukan di atas tanah seperti masyarakat pada umumnya yang tinggal di darat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan jejaring kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan program sertifikasi permukiman di atas air di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Adapun teknik analisis data yang dilakukan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan yakni teori Van Waarden (1992) dengan indikator aktor, fungsi, struktur, kelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jejaring kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan program sertifikasi permukiman di atas air terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa. Jejaring yang bekerja yaitu jejaring antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mekanisme pelaksanaan program sertifikasi permukiman di atas air di Kabupaten Bintan Khususnya di Kelurahan Kawal berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Bagi Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pelaksanaan program ini tentunya terdapat kendala di lapangan yakni terkait koordinasi antar instansi khususnya di Tingkat daerah, pada pelaksanaan sosialisasi, fasilitas dan akses pada saat turun lapangan. Peneliti menyarankan perlunya memberdayakan jejaring kebijakan diluar pemerintah maupun swasta.

Kata Kunci : Jejaring Kebijakan, Program, Sertifikasi Permukiman di Atas air.

***POLICY NETWORK ANALYSIS IN THE OVERWATER SETTLEMENT
CERTIFICATION PROGRAM IN KAWAL URBAN VILLAGE, GUNUNG
KIJANG SUB-DISTRICT, BINTAN DISTRICT***

***By :
Ayunatasya
NIM. 2005020028***

ABSTRACT

The certification program for settlements on the water is carried out as a form of ensuring legal protection for community settlements on the water. So far, it has been difficult for the community to get a certificate because they are above the sea, not on land like people who generally live on land. The purpose of this research is to find out and describe the policy networks involved in the implementation of the overwater settlement certification program in Kawal Village, Gunung Kijang District, Bintan Regency. This research uses qualitative research with descriptive analysis methods. The data analysis techniques used were interviews, observation, and documentation. The theory used is Van Waarden's theory (1992) with indicators of actors, functions, structures, institutions, rules of action, power relations, and actor strategies. The results of this study show that the policy network involved in the implementation of the overwater settlement certification program consists of the Central Government, Provincial Government, District Government, and Village Government. The network that works is the network between the Central Government and Local Government. The mechanism for implementing the overwater settlement certification program in Bintan Regency, especially in Kawal Village, is based on the Decree of the Director General of Marine Spatial Management Number 15 of 2023 concerning Implementation Guidelines for Facilitating Approval of Conformity of Marine Spatial Utilization Activities for Local Communities in Coastal Areas and Small Islands. The implementation of this program certainly has obstacles in the field, namely related to coordination between agencies, especially at the regional level, on the implementation of socialization, facilities and access when going to the field. Researchers suggest the need to empower policy networks outside the government and the private sector.

Keywords: Policy Network, Program, Overwater Settlement Certification.